

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor perbankan berperan sebagai mediator dan membantu transfer dana dari unit surplus ke unit defisit. Hal ini memberikan arti bahwa bank telah memfasilitasi pergerakan pembayaran dari pelanggan, pedagang, dan pemangku kepentingan. Oleh sebab itu, bank dianggap sebagai agen terpercaya karena seluruh usahanya dilandasi oleh kepercayaan antara nasabah dan bank. Semakin banyak nasabah yang percaya pada perbankan untuk kegiatan ekonomi, maka keberlangsungan bisnis bank umum dapat menjaga stabilitas perbankan.

Stabilitas perbankan merupakan cerminan dari kondisi keuangan bank, sehingga menganalisis stabilitas perbankan sangat penting. Menurut Yusgiantoro et al., (2019), stabilitas bank adalah suatu kondisi dimana bank berada dalam keadaan sehat dan bebas dari *financial distress*. Suatu bank dapat dikatakan stabil jika dilihat dari tingkat kesehatan perusahaan yang meliputi fungsi bank sebagai intermediasi berjalan dengan baik dan bank mempunyai mobilisasi pendanaan yang memadai (Saha et al., 2022). Jika kondisi tersebut tetap terjaga maka proses peredaran uang dan mekanisme transmisi kebijakan moneter perekonomian yang sebagian besar melalui sistem perbankan akan berjalan dengan baik. Jadi, ketika bank berada dalam kondisi rentan maka efektivitas kebijakan moneter akan terhambat karena bank akan semakin sulit merespon kebijakan moneter dengan baik. Sebaliknya, bank yang tidak stabil kemungkinan besar akan menyebar ke seluruh bank karena keterhubungan antar bank,

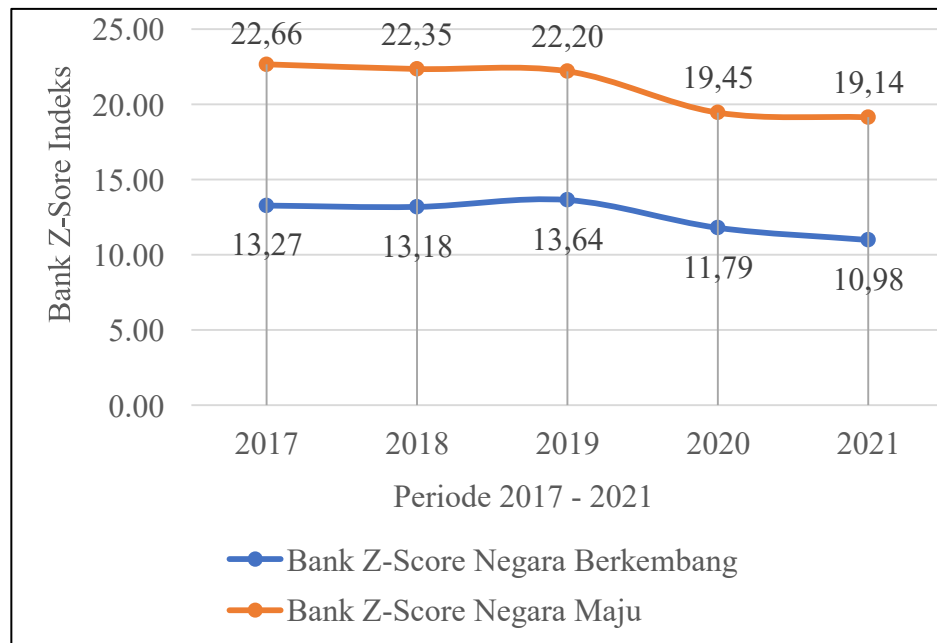
sehingga menyebabkan ketidakstabilan sistem keuangan dan berdampak buruk pada kondisi makroekonomi.

Kondisi sebenarnya banyak perbankan yang dalam praktiknya sering terjadi ketidakstabilan dan kegagalan bank. Kondisi tersebut bisa terjadi karena bank tidak didukung dengan kualitas institusi yang baik sehingga kinerja perbankan menjadi tidak optimal yang berdampak pada ketidakstabilan perbankan. Oleh karena itu, stabilitas atau instabilitas perbankan telah menjadi masalah yang signifikan di banyak negara di seluruh dunia, sehingga menjadi topik penelitian yang menarik bagi dunia akademis dan bagi regulator keuangan di seluruh dunia.

Analisis stabilitas perbankan dalam penelitian ini berfokus pada negara sedang berkembang untuk dijadikan sampel. Pasca krisis keuangan global tahun 2008, regulator bank di negara-negara berkembang memiliki agenda penting yaitu membuat peraturan lebih ketat seperti memberikan persyaratan kecukupan modal bagi perbankan. Langkah tersebut diharapkan dapat menjadikan sistem perbankan lebih tangguh, sehingga dapat memperkuat ketahanan atau stabilitas sektor perbankan,

Langkah regulator bank di negara-negara berkembang dengan memperketat kecukupan modal menjadi kontroversi. Modal bank yang lebih tinggi mungkin mengurangi perilaku berisiko dan membantu mengatasi masalah *moral hazard*, namun disisi lain persyaratan permodalan yang lebih ketat dapat menurunkan nilai laba bank, sehingga mendorong bank-bank di negara berkembang untuk melakukan aktivitas berisiko.

Menurut Luc Laeven & Levine, (2020),. Tingkat stabilitas bank dapat diukur dengan menggunakan z-score, semakin tinggi z-score mengindikasikan bahwa bank semakin stabil. Stabilitas perbankan dalam studi ini diukur dengan indeks zscore. Penelitian dari Yen et al., (2023) juga menggunakan z-score sebagai prinsip variabel untuk stabilitas perbankan. Oleh karena itu, studi ini menggunakan indeks z-score sebagai variabel untuk mengukur stabilitas perbankan.



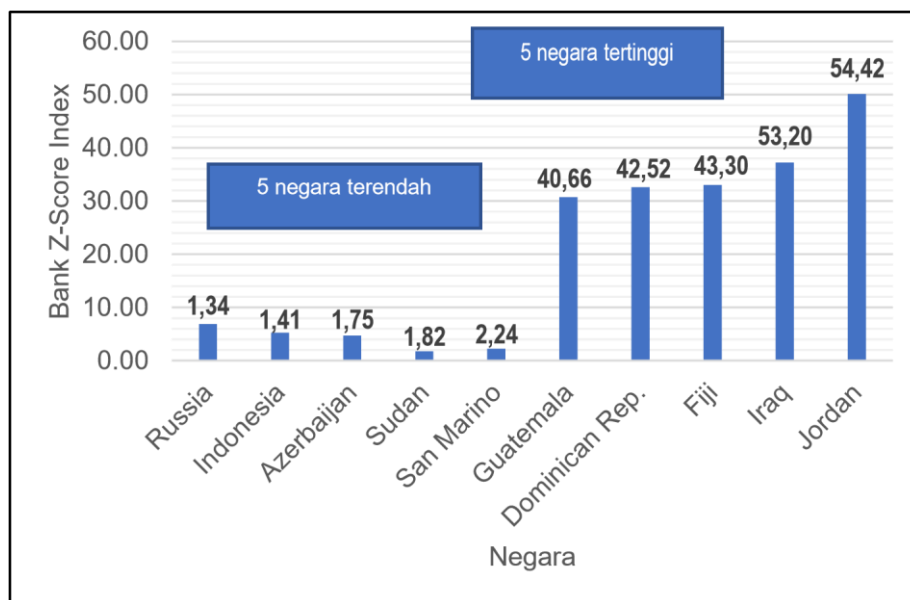
Sumber: World Bank

Gambar 1.1. Perkembangan Stabilitas Perbankan dengan Indikator ZScore

Gambar 1.1. menunjukkan bahwa perkembangan stabilitas perbankan di negara-negara berkembang tahun 2017-2021. Nilai z-score pada 2019-2021 di negara berkembang mengalami penurunan. Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran pada sektor perbankan di negara berkembang, sebab z-score perbankan menurun mengindikasikan bank akan mengalami ketidakstabilan. Menurunnya nilai z-score yang cukup ekstrim di tahun 2019 ke 2020 diakibatkan oleh adanya perang dagang Amerika dan China. Hal tersebut dikarenakan dampak dari perang dagang Amerika dan China salah satunya yaitu membuat ketidakpastian dan volatilitas meningkat sehingga aliran modal terganggu dan mengakibatkan nilai z-score menurun. Selain itu, nilai z-score bank-bank di negara sedang berkembang lebih rendah dibandingkan dengan negara maju. Hal ini memberikan arti bahwa *return on total assets* dan *equity to total assets* di negara maju lebih tinggi dibandingkan dengan negara berkembang.

Gambar 1.2. menunjukkan perkembangan stabilitas perbankan pada negara berkembang yang memiliki nilai terendah dan nilai tertinggi. Lima negara dengan bank z-score terendah Rusia, Indonesia, Azerbaijan, Sudan, dan San

Marino. Sedangkan bank z-score tertinggi yaitu Jordan, Iraq, Fiji, Dominican Republic, dan Guatemala. Menurut Altman (2000), jika nilai indeks bank z-score diantara 1,22 dengan 2,99, maka mengindikasikan bahwa perbankan di suatu negara mengalami permasalahan keuangan. Jika tidak segera diperbaiki, maka bank-bank kurang sehat. Oleh sebab itu, bank-bank di negara Rusia, Indonesia, Azerbaijan, Sudan, dan San Marino termasuk mengalami masalah keuangan dan kurang sehat.



Sumber: World Bank

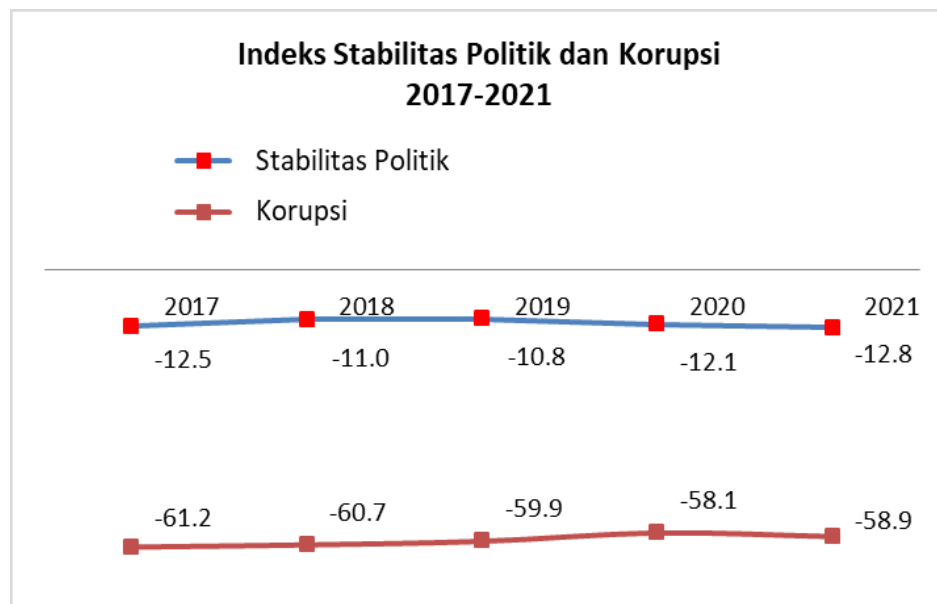
Gambar 1.2. Rata-rata Bank Z-Score di Negara Berkembang Periode 2017-2021

Gambar 1.2. juga menunjukkan bahwa negara Jordan memiliki indeks zscore tertinggi di negara berkembang. Sektor perbankan di Jordan dianggap sebagai salah satu pilar utama perekonomian Jordan. Meskipun dalam situasi geopolitik yang sulit, sektor ini mempunyai modal dan regulasi yang baik sehingga menjadikannya sektor yang tangguh dan menjanjikan. Hal tersebut menjadi penyebab indeks z-score di Jordan tinggi, sehingga dapat dilihat bahwa stabilitas perbankan di Jordan sangat baik.

Pemahaman terkait dengan kondisi stabilitas perbankan di negara sedang berkembang telah diuraikan. Selanjutnya, mengidentifikasi faktor yang dapat

mempengaruhi stabilitas perbankan. Sejumlah literatur menyarankan untuk menggunakan faktor kualitas kelembagaan misalnya seperti penelitian empiris yang diungkapkan oleh Hirata & Ojima, (2020), dimana faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas bank perlu dikembangkan dengan menggunakan indikator kualitas kelembagaan.

Pengaruh kualitas kelembagaan terhadap stabilitas bank masih menjadi perdebatan baik di kalangan akademisi maupun pembuat kebijakan. Kualitas kelembagaan dapat mengkondisikan peraturan dan pengawasan bank terhadap stabilitas bank (Fazio et al., 2018). Kualitas kelembagaan di suatu negara mempunyai peran penting dalam menjaga perbankan. Negara-negara yang tidak memiliki sistem hukum dan tata kelola/lingkungan kelembagaan yang baik mungkin memiliki bank yang lebih lemah karena korupsi, lemahnya penegakan hukum, dan peraturan yang tidak efektif (Levine, 1998). Sejalan dengan hal ini, Demirguc-Kunt et al., (1998) juga menunjukkan bahwa kerapuhan keuangan perbankan disebabkan institusi yang lebih lemah, khususnya yang berkaitan dengan supremasi hukum, tingkat korupsi, dan penegakan kontrak.



Sumber: World Bank

Gambar 1.3. Indeks Stabilitas Politik dan Korupsi di Negara Berkembang 2017-2021

Gambar 1.3. menunjukkan indeks stabilitas politik dan korupsi di negara berkembang pada periode 2017-2021. Indeks stabilitas politik dan korupsi di negara berkembang rata – rata kurang dari 2,5. Hal tersebut menunjukkan bahwa stabilitas politik dan korupsi di negara berkembang masih lemah. Bersumber dari *World Bank* bahwa rentang indeks -2,5 sampai dengan 2,5 menunjukkan skala dari yang terburuk sampai yang terbaik.

Indikator kualitas kelembagaan menurut World Bank meliputi enam indikator yang disebut *Worldwide Governance Indicators (WGI)*. Indikator kualitas kelembagaan tersebut meliputi, kebebasan bersuara dan akuntabilitas (*Voice and Accountability*), stabilitas politik (*Political Stability*), efektivitas pemerintahan (*Government Effectiveness*), Kualitas Regulasi (*Regulatory Quality*), hukum yang berlaku (*Rule of Law*), dan Pengendalian Korupsi (*Control of Corruption*). Dalam penelitian ini menggunakan dua indikator dari kualitas institusi yaitu, stabilitas politik dan korupsi. Hal ini karena menurut Mohammad & Helmi Bin Hidthiir, (2019) korupsi sangat berpengaruh terhadap stabilitas perbankan, sesuai dengan hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa pengendalian korupsi yang tinggi berpengaruh positif terhadap stabilitas sektor perbankan. Studi ini juga menemukan bahwa kontrol korupsi yang buruk secara signifikan memperburuk kemampuan bank untuk memiliki *solvabilitas* yang cukup dan menjalankan fungsi intermediasinya. Sedangkan stabilitas politik memiliki dampak signifikan terhadap stabilitas perbankan, sejalan dengan penelitian dari Bermpei et al., (2018) yang menyatakan bahwa ketidakstabilan politik dapat menyebabkan ketidakpastian dan kekhawatiran yang dapat memperburuk stabilitas perbankan.

Indikator kualitas kelembagaan pertama yaitu korupsi. Secara umum, korupsi didefinisikan sebagai penyalahgunaan jabatan perusahaan atau publik untuk kepentingan pribadi. Hal ini merupakan permasalahan yang berdampak negatif terhadap stabilitas perbankan di negara berkembang Etudaiye-Muhtar & Abdul-Baki, (2021); Mohammad et al., (2019); dan Yin, (2019) menyebutkan bahwa korupsi menjadi hambatan besar terhadap alokasi aset dampaknya terhadap

perbankan telah menarik perhatian dari para peneliti. Risfandy et al., (2022) menyimpulkan bahwa korupsi memperburuk keadaan kinerja perbankan melalui jalur kredit. Bank-bank di negara berkembang dengan tingkat korupsi tinggi menanggung tekanan politik dan menawarkan pinjaman kepada perusahaan-perusahaan serta individu-individu yang tidak layak mendapatkan kredit, sehingga mengarah pada terjadinya korupsi di kalangan pegawai bank dan meningkatkan rasio kredit bermasalah, dimana bank gagal bayar dalam jangka panjang. Kondisi ini mengganggu stabilitas perbankan.

Indikator kualitas kelembagaan kedua yaitu stabilitas politik. Stabilitas politik umumnya didefinisikan sebagai perubahan tak terduga dalam peraturan perundang-undangan, kebijakan perpajakan, pemilu mendatang, kerapuhan institusi, konflik dalam atau luar negeri, dan perubahan tak terduga dalam lingkungan bisnis (Goetz, 2018). Transmisi stabilitas politik terhadap stabilitas perbankan berdasarkan literatur empiris dalam dua cara.

Pertama, ketidakstabilan politik adalah sejenis ketidakpastian yang menyebabkan ketidakstabilan arus kas dalam proyek yang mendorong perusahaan untuk menunda proyek karena lingkungan politik yang tidak menentu. Hal ini dapat menghambat kegiatan perekonomian dan keuangan, maka dari itu arus kas yang tidak stabil berdampak pada aktivitas perbankan dan mengganggu stabilitas bank. Kedua, ketidakstabilan politik mempengaruhi kinerja perbankan dalam hal peningkatan biaya modal. Ketidakstabilan politik mendorong kompensasi atas risiko lebih tinggi perbankan (Saif-Alyousfi et al., 2020). Hal ini semakin menghambat kegiatan ekonomi dan keuangan dengan memberikan dampak negatif terhadap kinerja perbankan, sehingga stabilitas perbankan terganggu.

Nguyen et al., (2018) menemukan bahwa stabilitas politik berdampak positif terhadap stabilitas bank. Uddin et al., (2020) menemukan hasil yang berbeda, yaitu stabilitas politik dan korupsi tidak berdampak signifikan terhadap stabilitas bank. Peprah (2022) juga menemukan bahwa kualitas kelembagaan yang diukur dengan

stabilitas politik dan korupsi berpengaruh signifikan terhadap stabilitas perbankan. Kalhoru (2020) melakukan penelitian terkait kualitas kelembagaan dan stabilitas perbankan dan memberikan hasil penelitian bahwa korupsi yang lebih tinggi dan ketidakstabilan politik berdampak negatif terhadap stabilitas bank. Tandililin et al., (2021) menunjukkan hasil penelitian bahwa kualitas kelembagaan yang lebih baik, terutama pengendalian korupsi mendorong stabilitas bank.

Berdasarkan literatur terdahulu terdapat perbedaan hasil penelitian. Hal ini memberikan arti bahwa kualitas kelembagaan terhadap stabilitas perbankan masih dalam perdebatan penelitian, sehingga perlu dianalisis lebih lanjut untuk menutup kesenjangan penelitian. Beberapa pembaharuan yang ada dalam studi ini yaitu menggunakan metode regresi data panel dan uji ANOVA dilakukan membagi sampel z-score antar negara berkembang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dibuat, maka rumusan masalah dalam studi ini sebagai berikut:

1. Apakah stabilitas politik dan korupsi mempengaruhi stabilitas perbankan di negara berkembang?
2. Apakah terdapat perbedaan signifikan terhadap stabilitas perbankan di negara – negara berkembang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah disusun, maka tujuan penelitian dalam studi ini sebagai berikut:

1. Menguji dan menganalisis korupsi dan stabilitas politik terhadap stabilitas perbankan di negara berkembang
2. Mengidentifikasi dan menganalisis perbedaan stabilitas perbankan di negara berkembang

1.4 Manfaat penelitian

Manfaat studi ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan ilmiah dengan topik kualitas kelembagaan dan stabilitas perbankan. Selain itu, dapat dijadikan referensi pada penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan topik studi ini

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat bermanfaat menambah wawasan dan pengetahuan terkait hubungan kualitas kelembagaan dan stabilitas perbankan